
Fenomena Politik Identitas dalam Implementasi Politik Lokal

Phenomences of Political Identity in Local Political Implementation

Nur Suhailiza*, Dewi, Jhonathan Siagian, Grace Maria Lumbanraja, Jessica Silalahi, Dandi Sinambela & Julia Ivanna

Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial,
Universitas Negeri Medan, Indonesia

Diterima: 2021-05-23; Direview: 2024-04-10; Disetujui: 2024-11-17

Corresponding author: nursuhailiza04@gmail.com

Abstrak

Proses demokrasi, terutama dalam Pilkada, seringkali dipengaruhi oleh peran serta beragam partai dengan ideologi yang berbeda-beda, yang seringkali memanfaatkan identitas agama dan etnis sebagai alat politik. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji fenomena politik identitas di tingkat lokal atau daerah, dengan fokus pada dampak implementasi politik lokal. Data-data dikumpulkan melalui studi pustaka dan dianalisis secara kualitatif. Kajian ini menyimpulkan bahwa para elit politik sering menggunakan identitas sebagai strategi untuk mendapatkan dukungan dalam kontes politik. Faktor-faktor yang mempengaruhi Pilkada meliputi ekonomi politik, etnis, dan agama. Studi ini memberikan pemahaman lebih lanjut tentang dinamika politik identitas dalam konteks lokal, serta menyoroti pentingnya memahami dampaknya terhadap proses demokrasi di tingkat daerah.

Kata Kunci: Fenomena; Politik Identitas; Politik Lokal

Abstract

The democratic process, particularly in local elections (Pilkada), is often influenced by the participation of various political parties with diverse ideologies, which frequently utilize religious and ethnic identities as political tools. This article aims to examine the phenomenon of identity politics at the local or regional level, focusing on the impact of local political implementation. Data was collected through literature review and analyzed qualitatively. The study concludes that political elites often employ identity as a strategy to garner support in political contests. Influential factors in local elections include political economy, ethnicity, and religion. This study provides further insight into the dynamics of identity politics in a local context, highlighting the importance of understanding its implications for the democratic process at the regional level.

Keywords: Phenomenon; Identity Politics; Local Politics

How to Cite: Suhailiza, N., Dewi, Siagian, J., Lumbanraja, G.M., Silalahi, J., Sinambela, D. & Ivanna, J. (2025). Fenomena Politik Identitas dalam Implementasi Politik Lokal. *Journal of Law & Policy Review*. 3 (1): 85-92

PENDAHULUAN

Proses demokrasi di Indonesia merupakan proses yang sangat dipengaruhi oleh orientasi identitas agama dan etnis (Marijan, 2010). Hal ini tercermin dalam keikutsertaan partai-partai politik pada pemilu atau pilkada sebelumnya. Proses demokrasi, khususnya dalam Pilkada, seringkali melibatkan berbagai partai dengan ideologi yang beragam, yang masing-masing berusaha mempengaruhi hasilnya. Identitas agama dan etnis sering kali dijadikan alat politik untuk memperoleh dukungan (Huda, 2017; Ramadlan et al., 2019).

Pembentukan identitas dapat terjadi secara parsial, yaitu melalui kelompok-kelompok tertentu, atau secara interaksional, melalui interaksi antarindividu dan kelompok (Aprilia, 2005; Luthfi & Widyaningrat, 2020). Proses ini akan melahirkan perubahan di berbagai bidang, seperti sosial ekonomi, sosial politik, dan sosial budaya. Identitas etnis dan agama adalah dua elemen utama yang mendorong perubahan sosial di masyarakat Indonesia.

Identitas agama dan etnis tidak hanya mempengaruhi preferensi politik, tetapi juga mempengaruhi bagaimana kebijakan publik diimplementasikan (Alfaqi, 2015; Ali, 2020; Ridho et al., 2024). Dalam konteks ini, peran serta partai politik dan aktor-aktor lainnya menjadi sangat penting dalam menentukan arah perubahan sosial dan politik di Indonesia. Dengan demikian, memahami dinamika identitas dalam proses demokrasi Indonesia adalah kunci untuk memahami arah perubahan sosial yang lebih luas.

Proses terjadinya politik identitas keagamaan akan melahirkan dampak langsung maupun tidak langsung pada perubahan sosial begitupun sebaliknya (Lestari, 2018; Rosdiana & Annis Azhar Suryaningtyas, 2024; Samosir & Novitasari, 2021). Sedangkan adanya politik identitas etnisitas juga secara langsung atau tidak langsung, nyata atau tersamar melahirkan perubahan sosial. Tidak terkecuali pembentukan, penamaan dan penggunaan identitas melahirkan pula perubahan sosial.

Politik identitas seperti kesukuan yang ditampilkan oleh bakal calon terpilih dalam Pilkada dengan latar belakang kesukuannya merupakan salah satu pertimbangan penting dalam perilaku politik di Indonesia (Abadi et al., 2023; Daulay et al., 2019; Ruslan & Hakiki, 2022). Identitas kesukuan memiliki pengaruh signifikan terhadap partisipasi politik, terutama dalam Pilkada. Dalam konteks ini, identitas kesukuan mempengaruhi bagaimana individu dan kelompok berpartisipasi dalam proses politik, termasuk dalam pemilihan umum.

Kelemahan dari gerakan politik identitas adalah upaya untuk menciptakan kelompok khusus, di mana pribumi mengkhhususkan diri dan menolak non-pribumi (Ardipandanto, 2020; Sagala & Sarumpaet, 2018). Hal ini terjadi ketika kekuasaan tidak dapat ditaklukkan dan pembagian kekuasaan tidak tercapai sebagai tujuan gerakan. Dalam situasi ini, pemisahan dan pengecualian diri diambil sebagai jalan keluar untuk menjatuhkan pasangan calon yang lain. Politik identitas dapat memicu polarisasi dan eksklusivisme, yang pada akhirnya merugikan kohesi sosial dan integrasi nasional.

Di sisi lain, ada aspek positif yang dapat diambil dari politik identitas. Politik identitas berupaya untuk melestarikan nilai budaya yang menjadi ciri khas kelompok yang bersangkutan. Upaya untuk memperkuat budaya lokal dan identitas etnis dapat membantu menjaga keberagaman budaya dan mencegah hilangnya tradisi dan nilai-nilai budaya. Dengan demikian, penguatan identitas budaya dapat menjadi salah satu cara untuk memperkaya keragaman budaya Indonesia dan memperkuat ikatan sosial di antara berbagai kelompok etnis dan agama.

Berbagai penelitian terdahulu telah mengkaji peran identitas dalam proses politik di Indonesia. Penelitian yang dilakukan oleh (Mujani & Liddle, 2009) menunjukkan bahwa faktor identitas agama memiliki pengaruh signifikan terhadap perilaku memilih dalam pemilu nasional, khususnya di kalangan pemilih muslim yang cenderung memilih partai dengan afiliasi keislaman. Selanjutnya, studi yang dilakukan oleh Handoko & Hidayat (2023) menemukan bahwa dalam Pilkada di daerah-daerah dengan tingkat heterogenitas etnis yang tinggi, kandidat yang memiliki kesamaan etnis dengan mayoritas penduduk memiliki peluang elektoral yang lebih besar, terutama jika berhasil membangun narasi representasi etnis. Penelitian lain oleh Aspinall (2011) menyoroti fenomena meningkatnya penggunaan politik identitas di berbagai daerah pasca-reformasi, yang sering kali dimobilisasi oleh elit lokal untuk mempertahankan kekuasaan melalui



strategi populisme etnis dan agama. Ketiga penelitian tersebut menunjukkan bahwa politik identitas tetap menjadi variabel penting dalam dinamika demokrasi lokal di Indonesia dan memengaruhi tidak hanya proses elektoral, tetapi juga pola relasi sosial dan pembangunan kebijakan.

Dengan memahami dinamika identitas dalam proses demokrasi Indonesia, kita dapat lebih memahami arah perubahan sosial yang lebih luas dan bagaimana identitas etnis dan agama memainkan peran penting dalam pembentukan kebijakan publik dan perilaku politik.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif berupaya memahami fenomena melalui analisis data non-numerik yang diperoleh dari berbagai sumber. Dalam penelitian ini, studi pustaka (*library research*) menjadi metode utama untuk mengumpulkan data. Data yang digunakan berasal dari sumber kedua, yaitu buku-buku, e-book, jurnal ilmiah, hasil penelitian, artikel, dan opini yang dipublikasikan di media cetak lokal di Indonesia. Sumber-sumber ini diakses melalui website dan dokumen tertulis lainnya yang relevan dengan topik penelitian.

Data yang telah dikumpulkan dari berbagai sumber tersebut dianalisis menggunakan pendekatan analisis konten. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi tema-tema utama, pola, dan hubungan dalam data. Buku teks, e-book, jurnal ilmiah, hasil penelitian, artikel, dan opini dianalisis secara mendalam untuk memahami isi dan konteksnya. Selain itu, sumber tertulis lainnya yang bukan berasal dari internet, tetapi terkait dengan masalah penelitian, juga digunakan untuk memperkaya analisis.

Proses analisis dimulai dengan pengumpulan dan pengorganisasian data dari berbagai sumber. Setelah itu, data dianalisis untuk mengidentifikasi informasi yang relevan dengan tujuan penelitian. Langkah selanjutnya adalah menginterpretasikan temuan-temuan tersebut dan menarik kesimpulan yang didasarkan pada data yang telah dianalisis. Kesimpulan ini kemudian digunakan untuk memberikan wawasan tentang topik yang diteliti dan memberikan rekomendasi berdasarkan temuan penelitian.

Dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif dan studi pustaka, penelitian ini berupaya memberikan pemahaman yang komprehensif tentang fenomena yang diteliti, serta menawarkan perspektif yang mendalam berdasarkan analisis data dari berbagai sumber tertulis. Dengan penelitian kualitatif perlu dilakukan analisis deskriptif. Metode analisis deskriptif memberikan gambaran dan keterangan yang secara jelas, objektif, sistematis, analitis dan kritis mengenai kelebihan dan kekurangan adanya politik identitas di tingkat daerah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Politik identitas yang dijalankan oleh kelompok tertentu berupaya menciptakan negara dengan identitas tunggal, yang dapat mengaburkan sejarah keragaman Indonesia. Politik identitas ini sering kali mengabaikan fakta bahwa Indonesia adalah negara yang dibangun di atas dasar pluralisme etnis, budaya, dan agama. Menghadapi tantangan ini, tidak cukup hanya menggunakan politik identitas yang lebih lunak; kita harus mengutamakan politik yang menempatkan kepentingan publik di atas kepentingan pribadi atau kelompok.

Salah satu langkah penting adalah memastikan agama tidak dibawa ke ranah politik. Agama seharusnya menjadi keyakinan hidup dan pedoman moral bagi individu maupun masyarakat, dengan fokus pada keimanan, ritual peribadatan, dan moralitas. Di sisi lain, politik menekankan aturan main dalam perebutan dan pembagian kekuasaan dalam konteks kehidupan bernegara. Ketika agama digunakan sebagai alat politik dengan memanfaatkan sentimen primordial dan etnisitas, maka yang terjadi adalah politisasi agama. Ini dapat memicu kekerasan komunal secara horizontal dan merusak spirit demokrasi yang telah diperjuangkan dengan susah payah oleh rakyat Indonesia pada tahun 1998.

Para pemimpin agama memiliki peran krusial dalam mencegah politisasi agama. Pemimpin dari berbagai agama seperti Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Budha, dan Kong Hu Cu harus bekerja sama untuk mengarahkan umatnya agar tidak terjebak dalam politisasi agama yang dilakukan oleh kelompok-kelompok tertentu demi ambisi politik kekuasaan mereka. Mereka harus menekankan pentingnya menjaga kerukunan antarumat beragama dan mendorong partisipasi politik yang sehat dan beretika.

Di samping itu, pendidikan politik yang mengedepankan nilai-nilai demokrasi dan pluralisme harus ditingkatkan. Masyarakat perlu diberdayakan dengan pemahaman yang baik tentang pentingnya menjaga kebhinekaan dan menghindari praktik politik identitas yang dapat memecah belah. Partai politik juga harus berperan aktif dalam mengedukasi anggotanya dan konstituen mereka tentang bahaya politisasi agama dan pentingnya politik yang inklusif dan berbasis pada kepentingan bersama.

Dengan demikian, menghadapi tantangan politik identitas memerlukan kerjasama dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, pemimpin agama, partai politik, dan masyarakat sipil, untuk memastikan bahwa demokrasi Indonesia tetap kokoh dan inklusif.

Amy Gutmann membedakan tingkat keadaban politik identitas dengan menawarkan tiga kategori penggunaan identitas dalam demokrasi, yang ia sebut sebagai *good*, *bad*, dan *ugly*. Politik identitas bisa menjadi *good* (beradab) atau mempunyai peran positif dalam demokrasi ketika ia menyediakan nilai solidaritas dalam membangun kesadaran publik tentang kewargaan (*civic*) dan melawan diskriminasi kelompok dengan tanpa mempromosikan supremasi kelompok sendiri dan kebencian terhadap kelompok lain.

Politik identitas bisa tidak beradab dan berbahaya (*ugly*) jika mempromosikan nilai yang mengutamakan supremasi kelompok sendiri, mengampunayakan diskriminasi, dan menekankan cara pandang antagonis terhadap kelompok identitas lain, apalagi sampai melegitimasi kekerasan. Politik identitas menjadi berbahaya jika dilakukan dengan membangun narasi tentang perbedaan primordial atau rasial antarkubu dalam kontestasi politik. Retorika-retorika politik yang menggambarkan pertarungan politik dengan merujuk pada perang agama, dengan menarasikan musuh dalam label-label negatif keagamaan atau rasial, adalah praktik politik identitas yang berbahaya. Di antara keduanya ada bentuk politik identitas yang oleh Gutmann disebut *bad*. Politik identitas dalam kategori ini tidak secara aktif mempromosikan kesadaran publik yang positif, tetapi minimal tidak mengancam demokrasi dengan mempromosikan wacana permusuhan dan melegitimasi kekerasan antarkelompok identitas.

Di Indonesia politik identitas lebih terkait dengan masalah etnisitas, agama, ideologi, dan kepentingan-kepentingan lokal yang diwakili oleh para elit dengan artikulasinya masing-masing. Konflik antar identitas di bidang politik tidak secara terang-terangan dan memakan korban jiwa tetapi sering dijadikan sebagai komoditas politik oleh para politisi. Mereka menggunakan identitas sebagai alat untuk memperoleh dukungan suara untuk meraih jabatan (Mahgfira Faraidiany, 2019). Konsekuensi dari penggunaan identitas dalam kontes politik adalah munculnya kontestasi identitas.

Masyarakat dalam berpartisipasi melakukan pemilihan, ada faktor yang membentuk pengaruh partisipasi di Indonesia salah satunya adalah faktor etnis yang merupakan salah satu politik identitas. Seperti pada pemilihan gubernur Sumatera Utara tahun 2018 yang memiliki dua kandidat. Mereka adalah Edy Rahmayadi dan Musa Rajek Shah dan kandidat kedua yaitu Djarot Saiful Hidayat dan Sihar Sitorus. Latar belakang kedua pasangan tersebut berbeda yaitu pada etnis dan agama. (Mahgfira Faraidiany, 2019). Kandidat pertama yakni Edy Rahmayadi dan Musa Rajek Shah berasal dari Sumatera Utara dan keduanya beragama Islam. Dalam hal ini konflik antar kedua kandidat adalah terkait putra daerah. Masing-masing mengandalkan identitas mereka sebagai putra daerah. Pasangan pertama yakni Edy dan Musa merupakan asal Sumatera yang berarti putra daerah dari Sumatera Utara. Sedangkan pasangan kedua mengandalkan Sihar Sitorus sebagai putra karena berasal dari Sumatera Utara sedangkan Djarot hanya dianggap sebagai pendatang. Tak hanya itu pasangan Djarot juga mengandalkan identitas etnis Jawa karena di Sumatera Utara cukup banyak masyarakat yang bersuku Jawa.

Dalam hal ini kedua kandidat mengandalkan identitas masing-masing. Dan berharap identitas tersebut dapat menyatukan masyarakat untuk memilih diri mereka. Isu terkait putra daerah dan agama dalam kontes politik tersebut dapat menimbulkan konflik berupa perpecahan. Karena pasangan tersebut mengangkat isu terkait keagamaan. Menggunakan ulama untuk mendulang suara melalui isu-isu SARA (Daulay, 2019). Lawan Edy dan Musa adalah pasangan muslim dan non muslim, sehingga sangat mudah dalam memunculkan isu politik identitas oleh tim Edy untuk mendulang suara. Djarot yang merupakan pendatang dari pulau Jawa dan merupakan calon gubernur pada pemilihan kepala daerah di DKI Jakarta pada tahun 2017 dengan isu penistaan agama oleh Basuki Tjahja Purnama semakin meningkatkan isu agama dalam pemilihan gubernur di Sumatera Utara. Dengan menggunakan isu agama apalagi terkait penistaan agama tentunya akan menimbulkan konflik dan sikap tidak toleran terhadap masyarakat yang berbeda agama, saling menjatuhkan, dan juga yang lainnya.

Politik identitas adalah tidak bisa sepenuhnya hilang, pembentukan aliansi politik berdasarkan kesamaan identitas, nilai, atau latar belakang adalah konsekuensi yang tidak bisa dihindarkan dalam demokrasi yang menjamin kebebasan (Daulay, 2019). Ini berarti politik identitas termasuk hak politik yang dapat digunakan namun, hal tersebut jangan sampai menimbulkan perpecahan yang dapat membahayakan persatuan.

Politik identitas juga digunakan dalam pilkada walikota di Binjai pada tahun 2015. Dalam pilkada tersebut terdapat tiga kandidat yaitu pertama, Muhammad Idaham (etnis melayu) dan Timbas Tarigan (etnis karo); kedua, Juliadi dan Muhammad Tulen (keduanya etnis Jawa); ketiga, Saleh Bangun (etnis Karo) dan Dhani Setiawan (etnis Jawa) (Mukmin, 2018). Beragamnya identitas etnis yang ada di Binjai, terjadi persaingan antar etnis dalam momentum pilkada, dimana para calon menggunakan simbol identitas etnisnya untuk ditampilkan bahwa ia ingin menunjukkan kepada masyarakat yang memiliki kesamaan etnis dengannya untuk membangun eksistensi dari kelompok etnis tersebut.

Dalam penelitian (Mukmin, 2018) masyarakat dalam memilih walikota masih berdasarkan etnis. Suku Jawa memilih kandidat yang bersuku Jawa, Batak memilih kandidat yang Batak. Hal ini tentunya masyarakat tidak memilih berdasarkan kecakapan atau kepemimpinan para kandidat namun lebih pada sesama identitas. Untuk mengedepankan identitas yang dimiliki oleh para kandidat merupakan kebebasan cara mereka berpolitik asal tidak menimbulkan perpecahan.

Namun, dalam politik identitas yang mengedepankan kesamaan identitas bisa juga mengeratkan hubungan dengan sesama. Dengan adanya interaksi dan komunikasi dengan identitas yang sama maka akan mempererat solidaritas. Tak hanya itu seperti pada pilkada walikota binjai yang kandidatnya berbeda etnis seperti Muhammad Idaham dan Timbas Tarigan maka mereka akan menyatukan etnis melayu dan Karo untuk mendukung mereka. Hal ini cukup baik untuk menjalin persatuan antar etnis yang berbeda.

Pada pilkada 2017 di DKI penerapan politik identitas jua tidak bisa terlepas. Hal ini telah menjadi raw model bai beberapa daerah untuk menggunakan politik identitas sebagai pondasi utama bagi setiap kontestan untuk memenangkan pertarungan politik (Nasrudin, 2018). Mendominasinya politik identitas dalam ruang publik sehari-hari sekarang terjadi dengan gelombang yang begitu besar di media sosial bukan hal yang patut dirayakan karena dapat terjadinya serasi sosial secara horizontal yang semakin melebar. Ekonomi-politik, Etnis dan agama menjadi faktor dalam mempengaruhi proses pilkada. Walaupun dalam pilkada DKI Jakarta tidak terlepas dari politik identitas namun, hal tersebut tidak terlalu berpengaruh karena para pemilih DKI adalah pemilih yang lebih rasional, terdidik, dan dan lebih kritis. Hal tersebut menjadi kecenderungan dalam memilih mereka tidak terkait dengan identitas.

Kemenangan Edy Rahmayadi dan Musa Rajek Shah dalam pemilihan kepala daerah Medan 2017 menjadi bukti berhasilnya penggunaan basis kekuatan identitas. Politik identitas tumbuh subur dalam proses pemilihan kepala daerah karena dilakukan secara intens melalui interaksi simbolik untuk memobilisasi dukungan massa. Politik identitas ini berangkat dari dua faktor

utama: base on identity (identitas) dan base on interest (kelompok kepentingan). Kedua faktor ini dijadikan instrumen untuk memperoleh simpati dan dukungan dari masyarakat.

Merebaknya sentimen politik identitas di ranah publik dalam perhelatan demokrasi sering kali merupakan ulah dari sekelompok elite. Elite partai yang haus akan kekuasaan dan pemimpin organisasi massa yang merasa terpinggirkan menggunakan politik identitas untuk melancarkan agenda mereka. Mereka memanfaatkan sentimen etnis, agama, dan kepentingan kelompok untuk mengarahkan opini publik dan mendapatkan dukungan.

Fenomena ini menunjukkan bahwa politik identitas tidak hanya berfungsi sebagai alat mobilisasi, tetapi juga sebagai strategi untuk mempengaruhi hasil pemilihan. Dengan memanfaatkan sentimen identitas, elite-elite ini mampu memperkuat basis dukungan mereka dan mengarahkan hasil pemilihan sesuai dengan kepentingan mereka. Namun, strategi ini juga berpotensi memecah belah masyarakat dan merusak kohesi sosial yang selama ini terjaga. Oleh karena itu, penting untuk menjaga keseimbangan antara identitas dan kepentingan bersama dalam praktik politik, agar demokrasi dapat berkembang dengan sehat dan inklusif.

Praktek demokrasi di Indonesia tampaknya telah berubah menjadi perlombaan yang tidak mengenal kawan maupun lawan, di mana oligarki menguasai prosesnya. Demokrasi oligarkis ini sangat akrab dengan politisasi isu SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antar golongan) yang cenderung memecah belah masyarakat. Sentimen terhadap etnis minoritas yang terus terjadi mungkin merupakan rekayasa sosial yang dikonsepsikan oleh kelompok tertentu untuk menarik simpati dan dukungan masyarakat. Politisasi semacam ini sangat berbahaya karena dapat mengarah pada fasisme dan bahkan separatisme, di mana masyarakat yang tersegregasi berdasarkan identitas tertentu dapat dengan mudah dimobilisasi oleh kelompok dengan agenda tertentu.

Bahaya dari politik identitas yang berlebihan tidak hanya terletak pada potensi kekerasan komunal tetapi juga pada erosi nilai-nilai demokrasi itu sendiri. Ketika identitas etnis dan agama dijadikan alat politik, masyarakat menjadi terpecah dan kohesi sosial melemah. Ini menciptakan iklim ketidakpercayaan dan konflik yang berkelanjutan, yang pada akhirnya merusak fondasi demokrasi yang sehat.

Untuk mengatasi bahaya ini, penting bagi semua pihak untuk berkomitmen pada politik yang inklusif dan berorientasi pada kepentingan publik. Pemerintah perlu menegakkan hukum secara tegas terhadap praktik diskriminasi dan ujaran kebencian yang berbasis SARA. Selain itu, partai politik dan para pemimpin harus mengedepankan program-program yang mengutamakan kesejahteraan rakyat dan menjaga kerukunan sosial.

Pendidikan juga memegang peranan penting dalam menanamkan nilai-nilai toleransi dan kebhinekaan. Masyarakat harus diberdayakan dengan pemahaman bahwa perbedaan adalah kekuatan, bukan kelemahan. Kurikulum pendidikan perlu memasukkan materi yang mengajarkan pentingnya demokrasi, hak asasi manusia, dan kehidupan bersama dalam keragaman. Peran media juga krusial dalam membentuk opini publik yang sehat. Media harus bertanggung jawab dalam pemberitaannya dan menghindari penyebaran berita yang dapat memicu konflik SARA. Dengan kolaborasi dari semua elemen masyarakat, politik identitas yang merusak dapat ditekan, dan demokrasi Indonesia dapat berkembang dengan lebih baik dan inklusif.

SIMPULAN

Dengan demikian, dari uraian pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa orientasi politik yang mengarah pada identitas dan representasi yang melibatkan ekonomi, ras, dan agama merupakan fenomena yang membahayakan. Hal ini dapat menodai proses demokrasi di Indonesia, menggeser fokus dari kepentingan publik ke kepentingan kelompok tertentu. Demokrasi yang terkontaminasi oleh politik identitas semacam ini berisiko kehilangan fungsi utamanya yaitu untuk mewujudkan pemerintahan yang adil dan representatif bagi semua lapisan masyarakat. Politik identitas yang berbasis pada ekonomi, ras, dan agama memecah belah masyarakat dan menciptakan polarisasi yang dalam. Ketika proses demokrasi didominasi oleh sentimen identitas, ruang publik berubah menjadi arena konflik dan persaingan yang tidak sehat. Ini tidak hanya merusak integritas pemilihan, tetapi juga mengancam kohesi sosial dan stabilitas nasional. Akibatnya, kepercayaan masyarakat terhadap sistem demokrasi dapat menurun. Masyarakat yang



merasa terpinggirkan atau termarginalisasi mungkin menjadi apatis atau bahkan menentang proses politik yang ada. Dalam jangka panjang, hal ini dapat menghambat pembangunan dan kemajuan sosial ekonomi. Oleh karena itu, penting untuk menjaga proses demokrasi yang inklusif dan adil. Upaya ini harus melibatkan semua elemen masyarakat, termasuk pemerintah, partai politik, pemimpin agama, dan masyarakat sipil, untuk bekerja sama dalam mengatasi tantangan politik identitas dan memastikan bahwa demokrasi di Indonesia tetap berfungsi sebagaimana mestinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abadi, M., Alung, C., Permadi, I., & Schova, Y. (2023). Strategi Mitigasi Dampak Negatif Politik Identitas Sebelum dan Sesudah Pemilu. *Jakarta: Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia*, 4(2).
- Alfaqi, M. Z. (2015). Memahami Indonesia Melalui Perspektif Nasionalisme, Politik Identitas, Serta Solidaritas. *Jurnal Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan, Th 28 Nomo*, 111–115. <https://doi.org/10.17977/JPPKN.V28I2.5451>
- Ali, S. (2020). Politik Identitas Agama. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 6(1), 22–34.
- Aprilia, D. R. (2005). Iklan dan Budaya Populer: Pembentukan Identitas Ideologis Kecantikan Perempuan oleh Iklan (Analisis Semiotika Iklan Cetak WRP Body Shape & Prolene). *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 2(1).
- Ardipandanto, A. (2020). Dampak Politik Identitas Pada Pilpres 2019: Perspektif Populisme [The Impact of Identity Politics On President Election 2019: Populism Perspective]. *Jurnal Politica Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri Dan Hubungan Internasional*, 11(1), 43–63.
- Aspinall, E. (2011). Democratization and Ethnic Politics in Indonesia: Nine Theses. *Journal of East Asian Studies*, 11(2), 289–319. <https://doi.org/10.1017/S1598240800007190>
- Dauliy, S. M., Kusmanto, H., & Kadir, A. (2019). Politik Identitas Pada Pemilihan Gubernur Sumatera Utara tahun 2018. *Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal)*, 9(1), 51. <https://doi.org/10.31289/jap.v9i1.2230>
- Handoko, H., & Hidayat, S. (2023). PENGGUNAAN SENTIMEN PRIMORDIAL OLEH PASANGAN CALON JOKO WIDODO-K.H. MA'RUF AMIN DAN PRABOWO SUBIANTO-SANDIAGA SALAHUDDIN UNO DI PROVINSI BANTEN PADA PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2019. *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*. <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v6i6>
- Huda, N. (2017). *Penataan Demokrasi dan Pemilu di Indonesia*. Kencana.
- Lestari, Y. S. (2018). Politik Identitas Di Indonesia: Antara Nasionalisme Dan Agama. In *Journal of Politics and Policy* (Vol. 1, Issue 1).
- Luthfi, A., & Widyaningrat, A. I. (2020a). Konsep city branding sebuah pendekatan “the city brand hexagon” pada pembentukan identitas kota. *Seminar Nasional Manajemen Dan Bisnis*, 3(2013), 315–323.
- Luthfi, A., & Widyaningrat, A. I. (2020b). Konsep city branding sebuah pendekatan “the city brand hexagon” pada pembentukan identitas kota. *Seminar Nasional Manajemen Dan Bisnis*, 3(2013), 315–323.
- Marijan, Kacung. (2010). *Sistem Politik Indonesia: Konsolidasi Demokrasi Pasca Orde Baru*. Kencana Prenada Media Group.
- Mujani, S., & Liddle, R. W. (2009). Muslim Indonesia's secular democracy. *Asian Survey*, 49(4), 575–590. <https://doi.org/10.1525/AS.2009.49.4.575>
- Ramadhan, M. F. S., Wahid, A., Rakhmawati, F. Y., Destriy, N. A., Hair, A., Harjo, I. W. W., & Utaminingsih, A. (2019). *Media, Kebudayaan, dan Demokrasi: Dinamika dan Tantangannya di Indonesia Kontemporer*. Universitas Brawijaya Press.
- Ridho, M. R., Fachryan, R., Putra, L., Tinggi, S., Islam, A., Astuti, M., & Identitas, P. (2024). *PROBLEMATIKA POLITIK IDENTITAS DI NEGARA DEMOKRASI*. 6(2).
- Rosdiana, A. C., & Annis Azhar Suryaningtyas. (2024). Politik Identitas dalam Kampanye Politik Ganjar Pranowo Menjelang Pilpres 2024. *Jurnal Audiens*, 5(1), 77–90. <https://doi.org/10.18196/jas.v5i1.336>
- Ruslan, I., & Hakiki, K. M. (2022). Politik Identitas dan Tantangan Hubungan Antar Agama di Indonesia. *Al-Adyan: Jurnal Studi Lintas Agama*, 17(2), 201–222.
- Sagala, I. D., & Sarumpaet, B. A. M. (2018). Politik Identitas Etnis Dalam Pilkada Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Binjai Tahun 2015. *Anthropos: Jurnal Antropologi Sosial Dan Budaya (Journal of Social and Cultural Anthropology)*, 4(1), 139. <https://doi.org/10.24114/antro.v4i1.10268>

Nur Suhailiza, Dewi, Jhonathan Siagian, Grace Maria Lumbanraja, Jessica Silalahi, Dandi Sinambela & Julia Ivanna, Fenomena Politik Identitas dalam Implementasi Politik Lokal

Samosir, O., & Novitasari, I. (2021). DEMOKRASI, POLITIK IDENTITAS, DAN NASIB POLITISI MINORITAS: Refleksi menuju Pemilu Serentak Nasional Indonesia. *Konsorsium Publikasi Ilmiah Bidang Ilmu Sosial LLDIKTI Wilayah III*.

